



**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

Proposal Skripsi

**Oleh :
Astha Nur Hidayat
NIM. 120810301160**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TUBAN**

2018

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi baik sektor swasta maupun sektor publik. Pada organisasi publik anggaran harus diketahui oleh publik sehingga dapat memberikan evaluasi, kritik dan masukan untuk dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya, bagi organisasi swasta anggaran merupakan suatu hal yang dirahasiakan informasinya. Menurut Halim (2013), anggaran merupakan suatu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.

Tahun 2000 diterbitkan Peraturan Pemerintah No 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, mengakibatkan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu melimpahkan wewenang dari pusat kepada daerah dan diikuti dengan pelimpahan wewenang pengelolaan dana, menghasilkan perubahan yang mengharuskan pemerintah melakukan perubahan terhadap sistem keuangannya. Terbaru diterbitkan Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Hal tersebut berarti sudah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas dan diubah lagi dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD berdasar pertimbangan yang berlaku.

Anggaran Berbasis Kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Halim dan Kusufi, 2014). Anggaran ini menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas

kerja output, dimana juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.

Penerapan anggaran berbasis kinerja dikatakan berhasil jika realisasi anggaran tercapai dengan maksimal dan keseluruhan proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja dapat tercapai dari semakin maksimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja, ditinjau dari baiknya perencanaan anggaran yang dilakukan, persentase realisasi anggaran yang maksimal dan laporan pelaksanaan anggaran (Friska, 2014). Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan akan mencapai keberhasilan (Bastian, 2006)

Dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengharuskan pemerintah untuk memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan anggaran, pengendalian akuntansi, dan pelaporan. Selain itu juga merubah pertanggungjawaban pemerintah tidak hanya melakukan akuntabilitas vertikal, yaitu hanya pelaporan kepada atasan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal, yaitu pelaporan kepada masyarakat luas melalui DPRD (Mardiasmo, 2013).

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu hubungan antara pihak yang mengendalikan dengan pihak pengelola suatu entitas dan secara formal memiliki hak atau kekuasaan atas entitas masing-masing tersebut. Pada hakikatnya akuntabilitas menyangkut proses penyampaian informasi sedemikian rupa dan dalam bentuk isi yang sudah disepakati sehingga penerima informasi dapat melakukan analisis dan memberikan penilaian terhadap kerja karyawan (Moheriono, 2013)

Berdasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sasaran sistem AKIP adalah : (1) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, (2) terwujudnya transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat, dan (3) terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas pertanggung jawabannya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang mengatur perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk dapat meningkatkan pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, berisi tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dipandang penting untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Selain itu dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Tuban sudah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja dan diharapkan Pemerintah dapat merealisasikan anggaran yang sudah disusun dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan data yang didapat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id) APBD di Kabupaten Tuban setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2014 APBD sebesar Rp2.667.046.916.473 dan di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp3.033.788.172.456. Meskipun terus mengalami peningkatan tetapi penyerapan anggaran yang dilakukan masih kurang maksimal, seperti pada tahun 2014 penyerapan pada akhir tahun masih sekitar 61%, dan di tahun 2015 pada bulan Oktober penyerapan anggaran masih mencapai 47%. Selain itu pada saat mengajukan usulan P-APBD 2015 harus molor hal ini dikarenakan laporan pengelolaan anggaran tahun 2014 baru saja di audit. Hal ini mendasari peneliti untuk melihat pengaruh antara kenaikan APBD dengan akuntabilitas kinerja pemerintah di Kabupaten Tuban.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji hal tersebut dimana setiap penelitian menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Hal tersebut yang mendasari peneliti untuk mengambil judul **“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Perencanaan anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana pengaruh implementasi anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana pengaruh pelaporan anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban?
4. Bagaimana pengaruh evaluasi kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Tuban
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh implementasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Tuban
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pelaporan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Tuban
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Tuban

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Memberi manfaat serta kontribusi bagi akademisi dan pengembangan literatur akuntansi sektor publik dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Tuban

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan pemerintah untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Tuban.

3. Bagi Masyarakat

Memberi manfaat untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban yang lebih akuntabel.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep Akuntabilitas sendiri dapat dijelaskan menggunakan *agency theory*, dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pemberian tanggung jawab kepada pihak yang memberi untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan atas hasil upaya dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Moheriono, 2014). Dimana pihak yang diberikan tanggung jawab dalam hal ini adalah pemerintah (*agent*) dalam hal pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemberi tanggung jawab, dimana dalam hal ini adalah masyarakat yang diwakilkan oleh DPRD (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Konsep ini sesuai dengan variabel akuntabilitas kinerja pada penelitian ini.

Menurut Halim dan Abdullah (2014), menyatakan bahwa masalah keagenan di pemerintah daerah berlangsung secara terus menerus dan saling terkait pada semua tingkatan. Peraturan perundangan sendiri adalah salah satu bentuk kontrak yang bersifat *semi-given* yang dibentuk berdasarkan konstitusi oleh mekanisme politik pada level pemerintah yang lebih tinggi. Di pemerintahan sendiri terdapat suatu hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian, yaitu pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen kepada pemerintah, dari pemerintah sebagai satu kesatuan kepada menteri, dan dari pemerintah kepada birokrasi.

2.1.2 Teori Sistem Terbuka (*Open System Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Gibran dan Sekwat (2014) dimana merupakan pengembangan dari teori penganggaran yang lama (*line item budgeting, zero based budgeting* dan penganggaran program serta penganggaran kinerja) yang

dianggap rasionalitas teknikal. Teori sistem terbuka berpendapat bahwa ketika sebuah organisasi memelihara kondisinya lebih atau kurang selama jangka waktu tertentu, maka organisasi tersebut akan berusaha untuk mengembangkan suatu perbedaan, namun tetap memiliki kesamaan yang tinggi pada organisasi. Dimana hal ini membantu dalam menjelaskan bagaimana menempatkan perubahan dan reformasi dalam pemerintahan dan penganggaran secara sistematis.

Gibran dan Sekwat menyarankan 4 argumentasi sebagai berikut :

1. Teori penganggaran seharusnya selalu sadar bagaimana individu beraksi, lokasi mereka, fungsi dan interaksi pada sebuah sistem yang lebih besar.
2. Kajian tentang penganggaran seharusnya ditujukan pertama kali ke makro, kemudian konteks mikro sistem penganggaran memandang anggaran sebagai hasil dari sistem yang dinamis dari multi rasionalitas yang mengoperasikan bagian-bagian yang berbeda dalam proses penganggaran secara berbeda.
3. Sebuah teori tentang penganggaran seharusnya menjelaskan bagaimana interaksi antara tingkat makro pemerintah memengaruhi perilaku partisipan pada subsistem penganggaran dan membantu untuk menentukan kekuatan apa yang memengaruhi tujuan kebijakan, bagaimana tujuan penganggaran dipandang dan hasil dari interaksi ini.
4. Tingkat pemisahan atas subsistem penganggaran dengan menerapkan tingkat rasionalitas yang berbeda, teori ini menyediakan sebuah metode yang menguatkan beberapa masalah metodologi pada teori penganggaran tradisional.

Teori sistem terbuka memulai analisis dengan organisasi secara keseluruhan dan meneliti perilaku individu dengan melihat lokasi dan fungsi pada sistem yang lebih besar. Tipologi sistem dapat membantu menjelaskan aktivitas pemerintah sebagai satu kesatuan susunan interaktif yang menyatukan banyak jaringan internal dan eksternal sosial, politik dan ekonomi yang secara eksplisit teori ini mengakui kompleksitas administrasi publik, organisasi, dan penganggaran dan saling keterkaitan terhadap masyarakat. Pendekatan teori sistem terbuka ini memberikan usaha riset di masa mendatang untuk lebih mengkaji teori penganggaran publik tidak hanya dari aspek rasionalitas teknikal

saja, juga berkaitan dengan konteks yang lebih luas (Halim dan Kaufi, 2014). Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, teori penganggaran yang digunakan adalah penganggaran berbasis kinerja yang mensyaratkan adanya analisis standar belanja (ASB) dan standar pelayanan minimal (SPM).

2.1.3 Anggaran Sektor Publik

Menurut Nordiawan (2014), anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan dimana harus diinformasikan kepada publik untuk dapat dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Dengan masalah yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, dibutuhkan perencanaan anggaran supaya kegiatan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Ada beberapa pengertian mengenai anggaran Nordiawan (2014) mengemukakan bahwa anggaran sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan :

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2014), anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Menurut Mardiasmo (2013) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dinyatakan

dalam ukuran finansial yang berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran publik merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari organisasi, meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas serta estimasi mengenai apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan/pembiayaan belanja suatu negara selama periode tertentu. Pengertian APBN dapat dibedakan dalam arti luas yaitu anggaran negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Sedangkan dalam arti sempit, APBN berarti rencana pengeluaran dan penerimaan hanya dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki definisi sebagai rencana operasional keuangan pemda, di mana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim dan Kusufi, 2014)

Fungsi anggaran sektor publik, antara lain (Mardiasmo, 2013) :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan. Dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian. Untuk menghindari adanya pengeluaran terlalu besar, terlalu rendah, salah sasaran, atau penggunaan tidak semestinya.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran sebagai alat politik. Untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

7. Anggaran sebagai alat motivasi. Untuk memotivasi agar bekerja secara ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.

2.1.4 Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan, dimana manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada tiap unit kerja (Bastian, 2016)

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Variasi dalam sistem penganggaran dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut (Avionita, 2013).

Indikasi keberhasilan anggaran berbasis kinerja adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, serta adanya hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah (Isti'anah, 2013). Anggaran berbasis kinerja menekankan konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output, dimana mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan sistematis dalam proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2013).

Halim dan Kusfi (2014) menjelaskan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Namun, anggaran kinerja memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

1. Hanya sedikit dari pemerintah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.
2. Banyak jasa dan aktivitas pemerintah tidak dapat langsung terukur dalam satuan unit output atau biaya per unit yang dapat dimengerti.
3. Akun-akun dalam pemerintahan secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan. Membuat pengumpulan data untuk keperluan pengukuran kinerja sangat sulit, bahkan kadang tidak memungkinkan.
4. Kadang kala, aktivitas langsung diukur biayanya secara detail dan dilakukannya pengukuran lain tanpa pertimbangan yang memadai.

Tujuan dari diterapkannya penganggaran berbasis kinerja diharapkan pemerintah dapat menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik. Siklus anggaran meliputi 4 tahap yang terdiri atas (Mardiasmo, 2013) :

1. Tahap Persiapan Anggaran (*Budger Preparation*)

Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia yang didasari oleh visi, misi serta tujuan organisasi. Selain itu, sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya dilakukan penaksiran pendapatan terlebih dahulu.

2. Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budget Ratification*)

Melibatkan proses politik yang rumit. Pimpinan dituntut memiliki integritas dan kesiapan mental yang tinggi, dikarenakan pimpinan harus mempunyai kemampuan menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pernyataan dan bantahan dari legislatif.

3. Tahap Implementasi Anggaran (*Budgeting Implementation*)

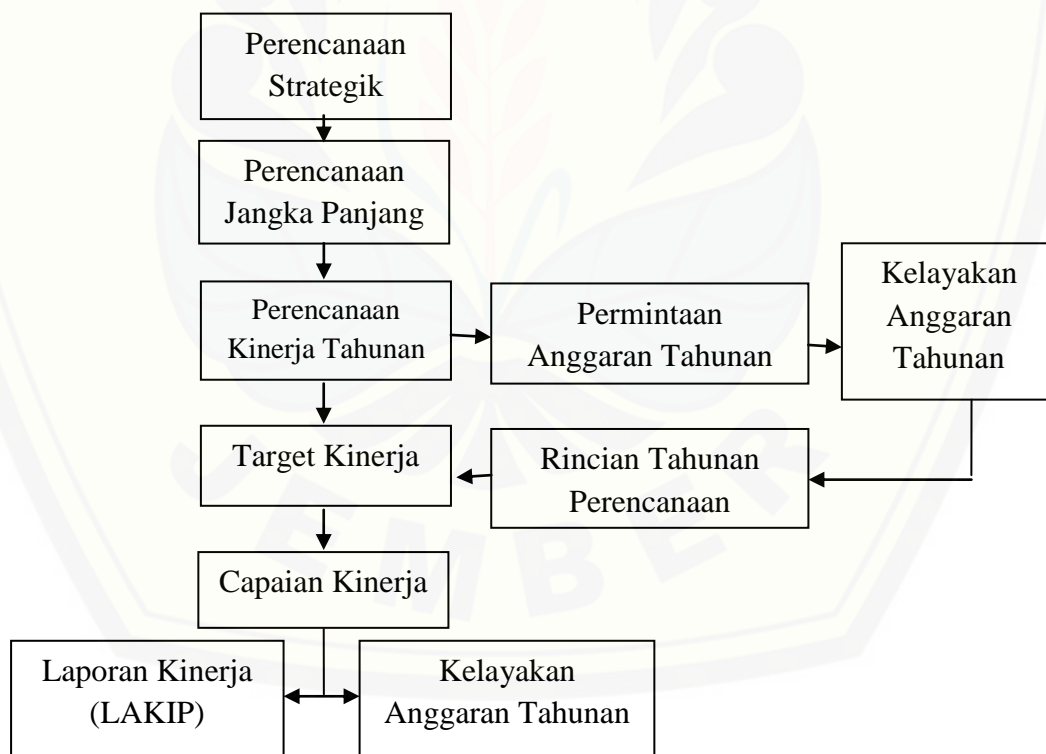
Dalam tahap ini, yang perlu diperhatikan adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan bertanggungjawab menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal

untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (*Budgeting Reporting and Evaluation*)

Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran terkait aspek operasi anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi terkait aspek akuntabilitas, sehingga apabila tahap implementasi sudah didukung dengan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik maka tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan memenuhi masalah.

Sistem penganggaran berbasis kinerja memiliki kerangka kerja yang secara sistematis dibangun untuk menghasilkan anggaran berbasis kinerja, dimana dijelaskan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas anggaran tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Kerja Sistem Anggaran Berbasis Kinerja
Sumber : Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP (2015)

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Deputy IV BPKP (2005), dijelaskan bahwa proses perencanaan penganggaran diawali dengan penyusunan strategi organisasi yang memiliki tujuan untuk visi, misi, tujuan serta sasaran organisasi dan untuk menetapkan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perencanaan strategis memiliki jangka waktu beberapa tahun kedepan yang komponennya memuat visi, misi, tujuan dan strategi serta program yang menyediakan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan program.

Rencana strategis tersebut dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat seluruh indikator dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun. Rencana kinerja memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang dituangkan dalam indikator kinerja kunci. Rencana ini juga merupakan tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menyelenggarakan programnya. Rencana ini diajukan kepada legislatif untuk mendapat persetujuan, sehingga terbit rencana anggaran tahunan yang disetujui oleh legislatif, lalu disusun rencana operasional tahunan.

Rencana operasional tahunan adalah rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang ada dalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan ketiga rencana tersebut, disusun kesepakatan kinerja yang berarti kesepakatan antara pemberi amanat kepada pihak yang menerima amanat tentang target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun anggaran, manajemen kinerja melakukan review, evaluasi dan penilaian atas hasil yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaporkan dalam laporan kinerja tahunan (LAKIP) yang meliputi laporan kinerja keuangan dan non-keuangan untuk digunakan sebagai masukan dalam membuat perencanaan anggaran di tahun berikutnya.

2.1.5 Perencanaan Anggaran

Perencanaan Anggaran adalah tahap estimasi pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan yang harus sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan yang sudah dirumuskan oleh instansi (Haspiarti, 2012)

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa APBN dan APBD yang dipresentasikan setiap tahunnya oleh eksekutif memberikan informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan bagaimana program-program dibiayai. Proses perencanaan anggaran memiliki 4 tujuan, yaitu :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD serta masyarakat luas.

Perencanaan anggaran disini menjelaskan bagaimana mendapatkan uang dan cara mengalokasikan dana yang didapatkan sehingga dapat digunakan dengan tepat dan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian rencana anggaran adalah perkiraan untuk waktu yang akan datang dan disusun secara sistematis atas dasar klasifikasi anggar yang digunakan.

2.1.6 Implementasi Anggaran

Menurut Haspiarti (2012) implementasi anggaran melibatkan lebih banyak orang dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, implementasi anggaran harus : (1) menjamin bahwa anggaran dilaksanakan sesuai wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan, (2) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro, (3) memutuskan adanya masalah yang muncul di pelaksanaannya, dan (4) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.

Implementasi anggaran juga harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan melakukan pengawasan serta pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran.

2.1.7 Pelaporan / Pertanggungjawaban Anggaran

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, berisi tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang kemudian disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dipandang penting untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Tujuan dari dibuatnya pertanggungjawaban anggaran adalah untuk memberikan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran. Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca. Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional. Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas. Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Laporan Perubahan Ekuitas. Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan. Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

2.1.8 Evaluasi Kinerja

Menurut Tiara (2015), evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan. Berdasarkan modul akuntabilitas instansi pemerintah (2007), tujuan dilakukannya evaluasi kinerja agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang, sehingga dengan adanya evaluasi kinerja yang dilakukan dengan baik diharapkan akan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya. Program dan kegiatan yang dievaluasi sudah tertuang dalam perencanaan strategis instansi yang bersangkutan yang harus merujuk kepada indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik itu input, proses, output, outcome, benefit dan impactnya, dan capaiannya.

2.1.9 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban pemberian pertanggung jawaban kepada pihak yang memberi untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan atas hasil upayanya dalam melaksanakan tugas

atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja harus merujuk kepada spektum yang lebih luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan organisasi, sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para penganban tugas tanggung jawab. Konsep akuntabilitas ini tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi, melainkan kepada masyarakat umum atau *stakeholders* (Moheriono, 2012).

Dalam Mangkunegara (2013) dijelaskan bahwa penerapan akuntabilitas berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang optimal dan legal dan harus bisa meningkatkan akuntabilitas formal yang ditetapkan organisasi. Dasar dari akuntabilitas pemerintah adalah keyakinan masyarakat yang mempunyai hak untuk mengetahui tentang pelaksanaan pemerintahan. Sehingga, publik memiliki hak untuk mengetahui apa yang direncanakan dan dilakukan pemerintah serta bagaimana kinerja pemerintah untuk mencapainya.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 2003). 3 unsur yang harus terpenuhi oleh akuntabilitas pemerintah untuk memberikan laporan kinerja, yaitu (Moheriono, 2012) :

1. Memberikan hasil analisis laporan tersebut kepada penerima pertanggungjawaban dari yang menilai.
2. Menerima eksekusi kekuasaan pertanggungjawaban dari yang memberi.
3. Menerima hasil penilaian prestasi kerja dalam bentuk penghargaan atau sanksi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua undang-undang tersebut mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah selaku pengguna anggaran untuk segera menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara tiap tahun. Dalam laporan ini, pemerintah

menyajikan dan mengumumkan informasi keuangan yang dapat diketahui oleh masyarakat/publik untuk dilihat dan dievaluasi atas kinerja keuangan yang telah dibuat kepada masyarakat umum.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia sudah diatur melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Negara (LAN) No 589/IX/6/Y/1999 tentang pedoman penyusunan pelaporan AKIP yang disempurnakan melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 239/IX/6/8/2003. Dalam tugasnya setiap instansi pemerintah harus menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berdasarkan dari rencana kerja dan kegiatan yang berpedoman dalam rencana strategis berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi instansi.

Hal tersebut lebih diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 sebagai lanjutan dari kedua undang-undang tersebut. Dalam PP ini diatur mengenai laporan kinerja yang harus dibuat dan dilaporkan oleh masing-masing instansi pemerintah dan juga dijelaskan mengenai format laporan serta petunjuk pengisian secara lengkap dan rinci. Ketentuan dalam keputusan ini agar setiap instansi memiliki rencana strategis, visi dan misi untuk mendukung proses perencanaan yang disusun oleh setiap instansi.

Selain itu juga dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dalam peraturan ini dijelaskan mengenai SAKIP yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Kegiatan SAKIP (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dalam prosesnya mencakup (1) mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik, (2) merumuskan visi, misi, tujuan sasaran dan strategi instansi pemerintah, (3) merumuskan indikator kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi, (4) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara menyeluruh, (5) mengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah daerah, serta (6) melakukan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang menjamin pengguna sumber daya secara konsisten dengan peraturan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
7. Komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi tahap-tahap (Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 2005) :

1. Perencanaan Strategis.

Meliputi penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang

mengungkapkan seluruh target kinerja yang akan dicapai dari seluruh sasaran strategis dalam tahun yang bersangkutan.

2. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran ini dilakukan menggunakan perbandingan antara realisasi dengan tolak ukur yang ditentukan. Perbandingan tersebut memberikan manfaat pada pengukuran kinerja pada saat realisasi dengan yang direncanakan, tetapi bermanfaat dalam bentuk keseriusan pemerintah dan instansi dalam membuat perencanaan.

3. Pelaporan Kinerja.

Dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

4. Pemanfaatan Informasi Kinerja.

LAKIP diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan memiliki wewenang yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang membedakan adalah pada skripsi ini penelitian dilakukan di tempat yang berbeda.

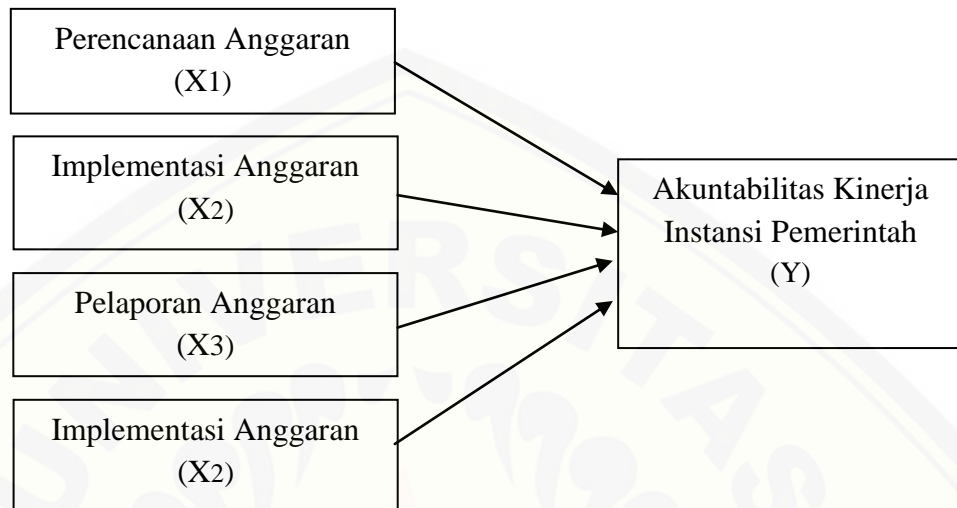
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

| PENELITI | HASIL PENELITIAN | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|---|---|--|--|
| Haspiarti (2012), Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Kota Parepare | Implementasi anggaran yang dilakukan semakin besar, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara implementasi anggaran dan akuntabilitas kinerja. | -Variabel analisis yang digunakan. -Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda | -Objek Penelitian -Sampel penelitian terfokus pada bagian akuntansi |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Friska (2014)</p> <p>Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD Provinsi Jambi)</p> | <p>Menunjukkan bahwa perencanaan, implementasi, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara parsial hanya variabel implementasi dan pelaporan yang berpengaruh positif, komitmen organisasi hanya memoderasi implementasi anggaran saja.</p> | <p>-Variabel analisis yang digunakan.</p> <p>-Sampel yang diambil yakni bagian penyusunan anggaran seperti kepala dinas.</p> | <p>-Objek Penelitian</p> <p>-Metode Analisis Data Menggunakan Moderating</p> |
| <p>Endrayani, Adiputra dan Darmawan (2014)</p> <p>Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja)</p> | <p>Menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p> | <p>-Variabel analisis yang digunakan.</p> <p>-Objek Penelitian</p> <p>--Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda</p> | <p>-Objek Penelitian</p> <p>-Teknonnik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh</p> |

2.3 Kerangka Konseptual

Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas dapat dilihat dari bagan berikut ini :



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Perencanaan Anggaran

Perencanaan Anggaran adalah tahap estimasi pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan yang harus sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan yang sudah dirumuskan oleh instansi. Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa APBN dan APBD yang dipresentasikan setiap tahunnya oleh eksekutif memberikan informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan bagaimana program-program dibiayai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dimana perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Parepare.

H1 : Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.4.2 Implementasi Anggaran

Menurut Haspiarti (2012) implementasi anggaran melibatkan lebih banyak orang dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, implementasi anggaran harus : (1) menjamin bahwa anggaran dilaksanakan sesuai wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan, (2) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro, (3) memutuskan adanya masalah yang muncul di pelaksanaannya, dan (4) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Endrayani, Adiputra dan Darmawan (2014) dapat disimpulkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kehutanan Bali.

H2 : Implementasi Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.4.3 Pelaporan Anggaran

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, berisi tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang kemudian disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dipandang penting untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Friska (2014), menyimpulkan bahwa pelaporan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

H3 : Pelaporan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.4.4 Evaluasi Kinerja

Menurut Tiara (2015), evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan. Berdasarkan modul akuntabilitas instansi pemerintah (2007), tujuan dilakukannya evaluasi kinerja agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) menyimpulkan bahwa evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kota Pare-Pare.

H4 : Evaluasi Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan penelitian kausatif, yaitu penelitian yang menyatakan hubungan sebab akibat (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini digambarkan fakta-fakta yang terjadi secara jelas dan dilihat dari pengaruh masing-masing variabel penyebab (X) terhadap variabel akibat (Y)

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yg ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010 dalam Avionita 2013). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di kabupaten Tuban.

Metode pemilihan sampel menggunakan Pemilihan Sampel Nonprobabilitas, yaitu pemilihan secara tidak acak. Tujuan dipilihnya metode ini dikarenakan pertimbangan waktu yang relatif lebih cepat dan biaya yang lebih murah. Dalam metode ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014). Dalam penelitian ini sampel yang dipilih merupakan responden yang berkaitan secara langsung dengan penyusunan anggaran daerah (TAPD), yang terdiri dari kepala dinas, kepala bidang, kepala sub bidang, kepala bagian dan kepala sub bagian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian (Supomo dan Indriantoro, 2014). Jenis data subjek yang diperoleh berupa opini, sikap, pengalaman dan karakteristik dari responden yang menjadi subjek penelitian.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah di Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, dimana dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner langsung kepada TAPD di beberapa instansi di Tuban yang bersangkutan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kuantitatif, yaitu kegiatan analisis data yang meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (Siregar, 2013)

3.7 Definisi Operasional

Variabel merupakan mediator antara *construct* yang abstrak dengan fenomena yang nyata (Indrianto dan Supomo, 2014). Variabel penelitian terdiri dari variabel independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran, implementasi anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala *Likert*, diberi skor berikut :

- 1) Skor 5 untuk kategori Sangat Setuju (SS)
- 2) Skor 4 untuk kategori Setuju (S)

- 3) Skor 3 untuk kategori Netral (N)
- 4) Skor 2 untuk kategori Tidak Setuju (TS)
- 5) Skor 1 untuk kategori Sangat Tidak Setuju (STS)

Untuk memudahkan dalam penulisan dan menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi operasional variabel yang digunakan, sebagai berikut :

1. Perencanaan Anggaran (X_1)

Perencanaan anggaran adalah tahap estimasi pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan.

Kuesioner yang digunakan merupakan milik Haspiarti (2012) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare), yang dipakai peneliti lain seperti Sulisiana (2013), Friska (2014) dan Krestiwawan (2015).

| Variabel | Indikator Penelitian |
|----------------------|---|
| Perencanaan Anggaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, misi, dan program 2. Catatan kerja 3. Penyusunan dokumen 4. Perencanaan anggaran 5. Penyusunan RKA-SKPD 6. Sinkronisasi program dan kegiatan 7. Penggunaan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas 8. Pembahasan RKA-SKPD 9. Kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD 10. Penetapan APBD |

Tabel 3.1 Indikator penelitian perencanaan anggaran

Skala pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *Likert* 5 poin. Skor tertinggi (poin 5) artinya responden Sangat Setuju dan skor terendah (poin 1) artinya responden Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti. Pada variabel ini digunakan pilihan skala jawaban responden : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju)

2. Implementasi Anggaran (X_2)

Selama tahap implementasi, pimpinan instansi bertanggungjawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan, dan bagian akuntansi melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran (*input*) dan *output*nya dalam sistem akuntansi keuangan

Kuesioner yang digunakan merupakan milik Haspiarti (2012) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare), yang dipakai peneliti lain seperti Sulisiana (2013), Friska (2014) dan Krestiwawan (2015).

| Variabel | Indikator Penelitian |
|-----------------------|---|
| Implementasi Anggaran | 1. Pelaksanaan anggaran 2. Acuan dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD 3. Prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja |

Tabel 3.2 Indikator Penelitian Implementasi Anggaran

Skala pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *Likert 5* poin. Skor tertinggi (poin 5) artinya responden Sangat Setuju dan skor terendah (poin 1) artinya responden Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti. Pada variabel ini digunakan pilihan skala jawaban responden : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju)

3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X_3)

Pelaporan dalam hal ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan beserta pencapaian hasil kerja atau kegiatan atau program yang telah dilaksanakan

Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner milik Haspiarti (2012) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare), yang sudah dipakai peneliti lain seperti Sulisiana (2013), Friska (2014) dan Krestiwawan (2015).

| Variabel | Indikator Penelitian |
|--------------------|--|
| Pelaporan Anggaran | 1. Laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas 2. Laporan keuangan SKPD dan |

| | |
|--|--|
| | Pemda yang dibuat sesuai dengan SAP 3. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APDB |
|--|--|

Tabel 3.3 Indikator Penelitian Pelaporan Anggaran

Skala pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *Likert* 5 poin. Skor tertinggi (poin 5) artinya responden Sangat Setuju dan skor terendah (poin 1) artinya responden Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti. Pada variabel ini digunakan pilihan skala jawaban responden : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju)

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan terhadap laporan kinerja perusahaan sehingga bisa diketahui dan dianalisis upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Apabila terjadi penyimpangan atau hambatan dalam melaksanakan implementasi anggaran, pemimpin bisa mengambil kebijakan untuk mengatasi penyimpangan tersebut.

| Variabel | Indikator Penelitian |
|------------------|--|
| Evaluasi Kinerja | 1. Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan 2. Evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas 3. <i>Reward</i> yang diberikan kepada SKPD |

Tabel 3.4 Indikator Penelitian Evaluasi Kinerja

Skala pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *Likert* 5 poin. Skor tertinggi (poin 5) artinya responden Sangat Setuju dan skor terendah (poin 1) artinya responden Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti. Pada variabel ini digunakan pilihan skala jawaban responden : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju)

5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

| Variabel | Indikator Penelitian |
|---|---|
| Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 4. Pencapaian kinerja 5. Kejelasan sasaran 6. Visi dan misi program 7. Evaluasi 8. Analisis keuangan 9. Pembuatan laporan 10. Investigasi 11. Pengawasan |

Tabel 3.5 Indikator Penelitian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Skala pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *Likert 5* poin. Skor tertinggi (poin 5) artinya responden Sangat Setuju dan skor terendah (poin 1) artinya responden Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti. Pada variabel ini digunakan pilihan skala jawaban responden : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju)

3.8 Metode Analisis

3.8.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan dalam bentuk tabel numerik dan grafis (Supomo dan Indrianto, 2014). Statistik deskriptif biasanya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan adalah : frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian), dan koefisien korelasi antar variabel penelitian.

3.8.2 Uji Kualitas Data

Kesimpulan dari penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada 2 konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu :

1. Uji Validitas

Uji ini digunakan untuk mengukur valid atau tidak suatu kuesioner. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu kuesioner akan dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Tingkat validitas di penelitian ini diukur dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing item pertanyaan dan total skor konstruk menggunakan aplikasi SPSS dengan uji *coefficient correlation person*. Jika skor memiliki tingkat signifikan $< 0,05$ maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2013)

2. Uji Reliabilitas

Uji ini digunakan untuk mengukur handal atau tidaknya suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Reliabilitas adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, dan apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Uji realibilitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara *One Shot*, dimana pengukuran tiap item pertanyaan dengan menyebar kuesioner kemudian hasil skornya diukur korelasi antara skor jawaban pada item pertanyaan yang sama dengan bantuan SPSS, dengan melihat *Cornbach Alpha* (α) dimana jika nilai $> 0,60$ maka item-item pertanyaan tersebut dikatakan *realible*.

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Data yang akan diolah dengan regresi berganda dibantu dengan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) yang harus memenuhi asumsi-asumsi tertentu agar model regresi tidak bias. Ada 3 asumsi, yaitu :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian pada kenormalan distribusi data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residul memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah dimana model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan

menggunakan analisis statistik, yaitu Kolmogrov–Smirnov test dengan kriteria pengujian α 0,05 sebagai berikut:

- a. Jika $\text{sig} \geq \alpha$ berarti data sampel yang diambil terdistribusi normal
- b. Jika $\text{sig} \leq \alpha$ berarti data sampel yang diambil tidak terdistribusi normal

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai dari (Ghozali, 2013) :

- a. Nilai *tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (a). *Tolerance Value* $> 0,10$
- b. Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat. Nilai VIF < 10

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varians dari residual untuk pengamatan pada model regresi. Model regresi dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas jika probabilitas dari hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heterokodastisitas dan sebaliknya jika probabilitas dari hasil korelasi lebih besar dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut berarti non heterokodastisitas (homokodastisitas.)

3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi adalah salah satu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (*variable independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*variable dependet*) (Ghozali, 2013).

Dari data yang telah dikumpulkan, maka akan diolah dengan menggunakan alat analisa regresi berganda (*Multiple Regression*) dengan

menggunakan program SPSS. Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Dimana koefisien regresi ini bertujuan untuk meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada (Ghozali, 2013).

Bentuk persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

- Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- a : Konstanta
- $b_{1,2,3}$: Koefisien regresi dari variabel independen
- X_1 : Perencanaan Anggaran
- X_2 : Implementasi Anggaran
- X_3 : Pelaporan Anggaran
- e : *Error term*

3.8.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013)

3.8.6 Uji F

Uji F merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan. Uji ini digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan signifikan atau belum

dengan ketentuan jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ berarti signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis dengan tingkat kepercayaan 95% (Ghozali, 2013)

3.8.7 Uji t

Indriantoro dan Supomo (2014) menjelaskan penggunaan metode statistik untuk penelitian terhadap satu variabel penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dapat ditentukan berdasarkan tujuan studi dan skala pengukuran variabel yang bersangkutan. Uji hipotesis terhadap satu variabel umumnya berupa uji perbedaan nilai sampel dengan populasi atau nilai dari data yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis) peneliti.

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji t. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5% (0,05) sehingga (Nugroho, 2013) :

1. Hipotesis

H₀ : Perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H_a : Perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2. Kriteria Pengujian

Jika probabilitas $> 0,05$ maka *H_a* ditolak

Jika probabilitas $< 0,05$ maka *H_a* diterima

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian regresi linier berganda atas pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Ini membuktikan Perencanaan Anggaran yang baik mampu meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
2. Hasil pengujian regresi linier berganda atas pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Ini membuktikan Pelaksanaan Anggaran yang baik mampu meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
3. Hasil pengujian regresi linier berganda atas pengaruh Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Ini membuktikan Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran yang baik mampu meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
4. Hasil pengujian regresi linier berganda atas pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Ini membuktikan Evaluasi Kinerja yang baik mampu meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah

1. Banyaknya agenda kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban sehingga proses penyebaran kuisioner membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.
2. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sample* dalam menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, dimana kelemahan dari teknik ini adalah kurang representatif untuk mengambil kesimpulan secara umum, atau hasilnya tidak dapat digeneralisasikan.

5.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan koordinasi sebelum melakukan penyebaran kuisioner sehingga responden yang dituju berada ditempat.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian misalnya Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro serta Kabupaten Gresik dan menggunakan teknik pengambilan sampel yang lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, Muhammad Firdiansyah & Putu Sudana. 2015. Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. Universitas Udayana, Bali
- APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015. Diakses dari <http://Tubankab.go.id/apbd-kabupaten-Tuban-tahun-anggaran-2015/>
- Avionita, Venni. 2013. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah. Bandung
- Bastian, Indra. 2016. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Deputi IV BPKP. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. 2015
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Didownload dari Situs www.djpk.depkeu.go.id
- Endrayani, Komang Sri, I Made Pradana Adiputra, & Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). Universitas Udayana, Bali.
- Friska, Indriani Yulia. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi). Jambi

- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2014. Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta:Salemba Empat
- Haspiarti. 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare. Universitas Hasanudin, Makassar.
- Herawati, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Jurnal Penelitian Universitas Jambi. Vol. 13 No. 2.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 5. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta. BPFE-YOGYAKARTA.
- Isti'anah. 2010. Penerapan dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik. Vol. 5 No. 1.
- Kepala Lembaga Administrasi Negara. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. 2003
- Mardiasmo. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV. Yogyakarta:ANDI
- Mangkunegara, DR A.A Anwar Prabu. 2013. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: Penerbit Refika Aditama
- Moheriono. 2014. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada

Muda, Taufik Djundjung. 2005. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan. Disertasi. UNPAD. Jawa Barat

Nina, Widiawati. 2009. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Nugroho, Yohanes Anton. 2013. Olah Data dengan SPSS. Yogyakarta: PT. Skripta Media Creative

Pemerintah Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lampiran 1 Kuisisioner**PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN**

Kepada Yth,

Bapak/Ibu

di Tempat

Hal : Permohonan untuk menjadi responden

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan skripsi pada program Sarjana Akuntansi Universitas Tuban, maka peneliti mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dalam rangka penulisan skripsi, maka peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner dan memilih jawaban pada kolom yang telah disediakan.

Jawaban dari kuesioner ini akan peneliti gunakan sebagai keperluan untuk menyusun skripsi yang berjudul, **“PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban)”**. Maka untuk itu pengisian kuesioner ini mohon diisi secara objektif. Atas kesediaannya dalam mengisi kuesioner ini, diucapkan banyak terima kasih.

Tuban, 2018

Yang membuat pernyataan,

Astha Nur Hidayat
120810301160

Identitas Responden

Mohon di isi dengan memberikan tanda centang (√) pada pertanyaan pilihan dan menjawab secara singkat dan jelas pada pertanyaan isian.

1. Nama: (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan
3. Usia : Tahun
4. Jabatan :
5. Berapa Periode Bapak/Ibu/Sdr. menjadi anggota Instansi
 1 Periode >1 Periode
6. Strata pendidikan:
 SLTA/Sederajat DI D2 D3 D4 SI S2
 S3 Lainnya

Petunjuk Pengisian Kuesioner :

Mohon di isi dengan memberikan tanda centang (√) pada kuisisioner .

Keterangan :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

ANGGARAN BERBASIS KINERJA (X)

Dalam pernyataan mengenai anggaran berbasis kinerja dibagi menjadi 4 (empat) variabel. Variabel pertama adalah perencanaan anggaran, variabel kedua pelaksanaan anggaran, variabel ketiga adalah pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, dan variabel keempat adalah evaluasi kinerja.

Daftar Singkatan:

- RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- KUA : Kebijakan Umum Anggaran
- PPAS : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
- BUD : Bendahara Umum Daerah
- LRA : Laporan Realisasi anggaran
- PPA : Pejabat Pengguna anggaran
- PPKD : Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
- DPA : Dokumen Pelaksanaan anggaran
- RKA : Rencana kerja dan Anggaran

PERENCANAAN ANGGARAN (X1)

| Pernyataan | Penilaian | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|
| | STS | TS | N | S | SS |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala daerah yang ingin dicapai. | | | | | |
| 2. RKPD memuat mengenai kerja yang terukur dan pendanaannya. | | | | | |
| 3. Dokumen KUA didasarkan pada dokumen RKPD dalam periode tersebut. | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4. SKPD dalam hal perencanaan anggarannya mengikuti prioritas dan PPAS dalam menyusun RKA-SKPD. | | | | | |
| 5. Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tercantum dalam nota kesepakatan PPA antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. | | | | | |
| 6. Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. | | | | | |
| 7. Dalam penyusunan RKA-SKPD, memperhatikan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja. | | | | | |
| 8. Dalam penyusunan RKA-SKPD, RAPBD serta pembahasannya mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati antara pemerintah, DPRD, dan SKPD itu sendiri. | | | | | |
| 9. PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi. | | | | | |
| 10. Penetapan APBD menjadi peraturan daerah dilakukan setelah adanya evaluasi APBD dari provinsi dan evaluasi APBD dari kabupaten/kota. | | | | | |

PELAKSANAAN ANGGARAN (X2)

| Pernyataan | Penilaian | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|
| | STS | TS | N | S | SS |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Dalam pelaksanaan anggaran SKPD mengacu kepada DPA dan Rencana Anggaran Kas yang telah disahkan. | | | | | |
| 2. Dokumen Anggaran Kas dan DPA digunakan oleh BUD sebagai acuan dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD. | | | | | |
| 3. SKPD dalam pelaksanaan anggarannya telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen DPA dan Anggaran Kas. | | | | | |

PELAPORAN / PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN (X3)

| Pernyataan | Penilaian | | | | |
|--|-----------|-----|-----|-----|-----|
| | STS | TS | N | S | SS |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi. | | | | | |
| 2. Laporan keuangan SKPD dan Pemda yang dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. | | | | | |
| 3. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan pemda dan laporan keuangan perusahaan untuk diperiksa oleh BPK dan bentuk | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| pertanggungjawaban kepada publik. | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|

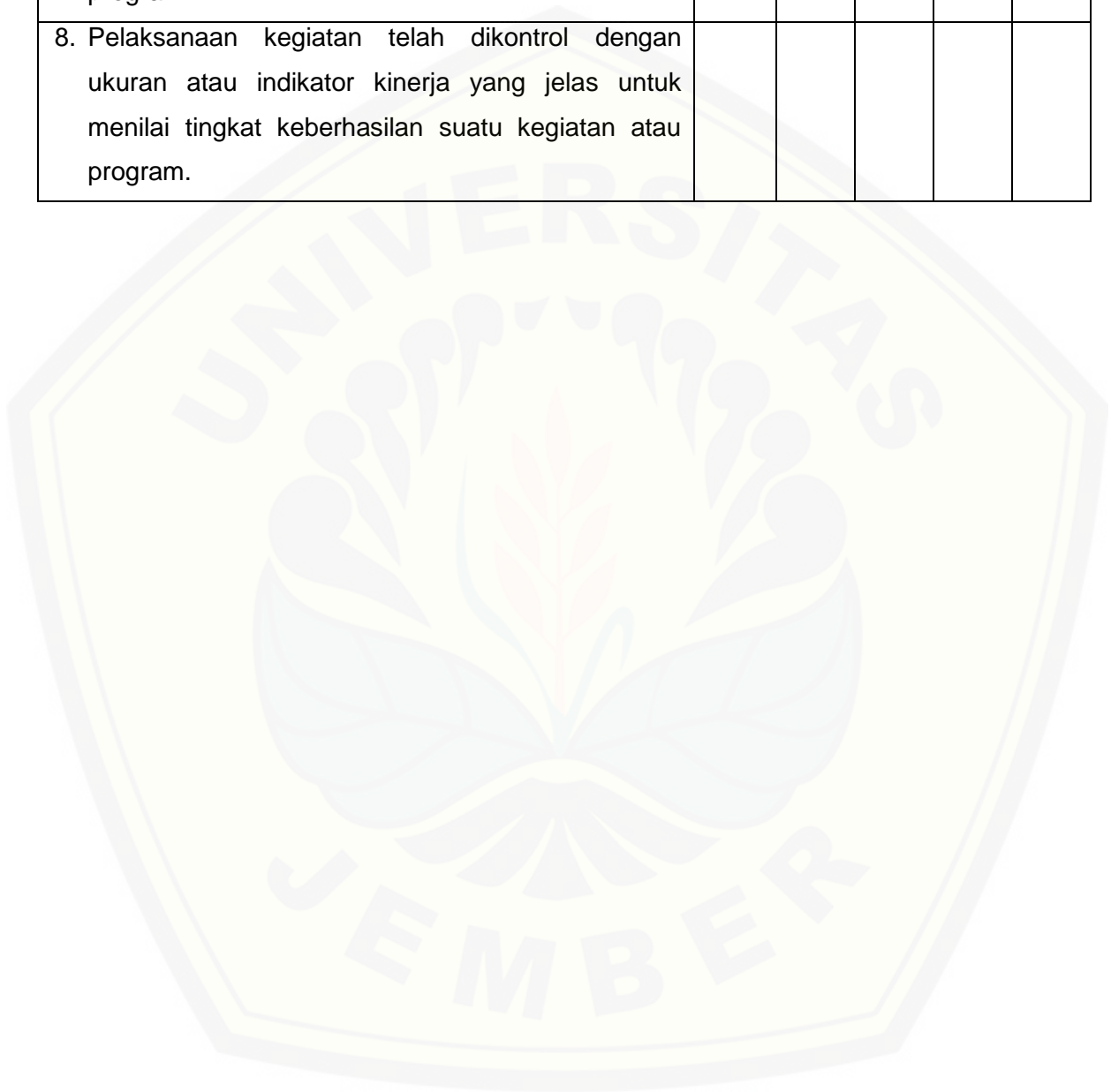
EVALUASI KINERJA (X4)

| Pernyataan | Penilaian | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|
| | STS | TS | N | S | SS |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan. | | | | | |
| 2. Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan | | | | | |
| 3. Setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya reward yang diberikan kepada SKPD yang mencapai target anggaran. | | | | | |

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y)

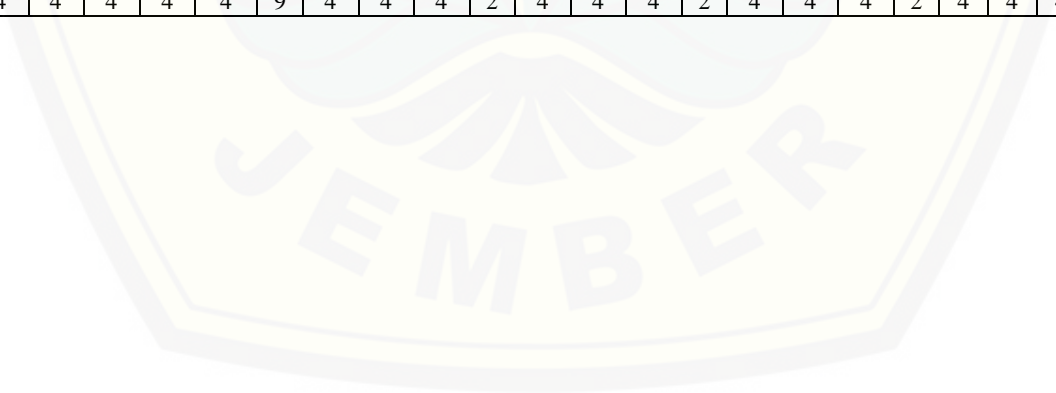
| Pernyataan | Penilaian | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|
| | STS | TS | N | S | SS |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan. | | | | | |
| 2. Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin | | | | | |
| 3. Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi. | | | | | |
| 4. Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program. | | | | | |
| 5. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan. | | | | | |
| 6. Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| atau program yang telah dilaksanakan. | | | | | |
| 7. Melakukan pengecekan terhadap jalannya program. | | | | | |
| 8. Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program. | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 17 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 18 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 21 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 26 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| 27 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| 29 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 31 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 34 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | |
| 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | |
| 42 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 43 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
| 44 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | | |
| 45 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | | |
| 46 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| 47 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| 48 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |



Lampiran 3 Jawaban Responden

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|--------|----------------|
| X1.1 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,7083 | ,96664 |
| X1.2 | 48 | 2,00 | 5,00 | 4,1875 | ,53221 |
| X1.3 | 48 | 2,00 | 5,00 | 4,1458 | ,68384 |
| X1.4 | 48 | 2,00 | 5,00 | 4,1458 | ,77156 |
| X1.5 | 48 | 2,00 | 5,00 | 4,0208 | ,72902 |
| X1.6 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,8333 | ,75324 |
| X1.7 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,9583 | ,65097 |
| X1.8 | 48 | 2,00 | 5,00 | 4,0000 | ,58346 |
| X1.9 | 48 | 2,00 | 5,00 | 4,0000 | ,71459 |
| X1.10 | 48 | 2,00 | 5,00 | 4,0000 | ,68417 |
| X2.1 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,8958 | ,66010 |
| X2.2 | 48 | 2,00 | 5,00 | 4,0208 | ,56454 |
| X2.3 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,5417 | ,74258 |
| X3.1 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,6875 | ,85443 |
| X3.2 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,9167 | ,73899 |
| X3.3 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,8125 | ,86679 |
| X4.1 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,6458 | ,72902 |
| X4.2 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,6250 | ,63998 |
| X4.3 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,4583 | ,87418 |
| Y.1 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,7500 | ,78551 |
| Y.2 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,6667 | ,75324 |
| Y.3 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,8125 | ,60692 |
| Y.4 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,7083 | ,77070 |
| Y.5 | 48 | 2,00 | 5,00 | 4,1458 | ,68384 |
| Y.6 | 48 | 2,00 | 5,00 | 4,0417 | ,54415 |
| Y.7 | 48 | 2,00 | 5,00 | 3,9375 | ,63267 |
| Y.8 | 48 | 1,00 | 5,00 | 3,3958 | ,93943 |
| Valid N (listwise) | 48 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| X1.6 | Pearson Correlation | ,107 | ,080 | ,213 | ,519* | ,394* | 1 | ,506* | ,484* | ,277 | ,083 | ,622* |
| | Sig. (2-tailed) | ,469 | ,591 | ,145 | ,000 | ,006 | | ,000 | ,000 | ,057 | ,577 | ,000 |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| X1.7 | Pearson Correlation | ,352* | -,038 | ,014 | ,436* | ,719* | ,506* | 1 | ,784* | ,503* | ,334* | ,783* |
| | Sig. (2-tailed) | ,014 | ,796 | ,925 | ,002 | ,000 | ,000 | | ,000 | ,000 | ,020 | ,000 |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| X1.8 | Pearson Correlation | ,302* | ,069 | ,053 | ,284 | ,500* | ,484* | ,784* | 1 | ,510* | ,267 | ,707* |
| | Sig. (2-tailed) | ,037 | ,644 | ,719 | ,051 | ,000 | ,000 | ,000 | | ,000 | ,067 | ,000 |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| X1.9 | Pearson Correlation | ,185 | ,336* | ,087 | ,347* | ,531* | ,277 | ,503* | ,510* | 1 | ,479** | ,706* |
| | Sig. (2-tailed) | ,209 | ,020 | ,556 | ,016 | ,000 | ,057 | ,000 | ,000 | | ,001 | ,000 |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| X1.10 | Pearson Correlation | ,193 | ,467* | ,500* | ,081 | ,427* | ,083 | ,334* | ,267 | ,479* | 1 | ,625* |
| | Sig. (2-tailed) | ,189 | ,001 | ,000 | ,586 | ,002 | ,577 | ,020 | ,067 | ,001 | | ,000 |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| X1 | Pearson Correlation | ,469* | ,383* | ,335* | ,548* | ,748* | ,622* | ,783* | ,707* | ,706* | ,625** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,001 | ,007 | ,020 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

| | | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2 |
|------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| X2.1 | Pearson Correlation | 1 | ,006 | -,056 | ,542** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,968 | ,705 | ,000 |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 |
| X2.2 | Pearson Correlation | ,006 | 1 | ,074 | ,543** |
| | Sig. (2-tailed) | ,968 | | ,617 | ,000 |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 |
| X2.3 | Pearson Correlation | -,056 | ,074 | 1 | ,651** |
| | Sig. (2-tailed) | ,705 | ,617 | | ,000 |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 |
| X2 | Pearson Correlation | ,542** | ,543** | ,651** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

| | | X3.1 | X3.2 | X3.3 | X3 |
|------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| X3.1 | Pearson Correlation | 1 | ,093 | ,149 | ,659** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,531 | ,312 | ,000 |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 |
| X3.2 | Pearson Correlation | ,093 | 1 | ,141 | ,589** |
| | Sig. (2-tailed) | ,531 | | ,339 | ,000 |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 |
| X3.3 | Pearson Correlation | ,149 | ,141 | 1 | ,688** |
| | Sig. (2-tailed) | ,312 | ,339 | | ,000 |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 |
| X3 | Pearson Correlation | ,659** | ,589** | ,688** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

| | | X4.1 | X4.2 | X4.3 | X4 |
|------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| X4.1 | Pearson Correlation | 1 | ,758** | ,427** | ,862** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,000 | ,002 | ,000 |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 |
| X4.2 | Pearson Correlation | ,758** | 1 | ,390** | ,832** |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | | ,006 | ,000 |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 |
| X4.3 | Pearson Correlation | ,427** | ,390** | 1 | ,779** |
| | Sig. (2-tailed) | ,002 | ,006 | | ,000 |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 |
| X4 | Pearson Correlation | ,862** | ,832** | ,779** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 48 | 48 | 48 | 48 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

| | Y.1 | Y.2 | Y.3 | Y.4 | Y.5 | Y.6 | Y.7 | Y.8 | Y |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Y.1 Pearson Correlation | 1 | ,432** | ,167 | ,158 | ,149 | ,075 | ,225 | ,223 | ,504** |
| Sig. (2-tailed) | | ,002 | ,256 | ,283 | ,314 | ,614 | ,125 | ,127 | ,000 |
| N | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Y.2 Pearson Correlation | ,432** | 1 | ,558** | ,489** | ,096 | ,242 | ,402** | ,431** | ,735** |
| Sig. (2-tailed) | ,002 | | ,000 | ,000 | ,515 | ,097 | ,005 | ,002 | ,000 |
| N | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Y.3 Pearson Correlation | ,167 | ,558** | 1 | ,608** | ,221 | ,282 | ,190 | ,618** | ,726** |
| Sig. (2-tailed) | ,256 | ,000 | | ,000 | ,131 | ,052 | ,195 | ,000 | ,000 |
| N | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Y.4 Pearson Correlation | ,158 | ,489** | ,608** | 1 | ,123 | ,435** | ,485** | ,545** | ,765** |
| Sig. (2-tailed) | ,283 | ,000 | ,000 | | ,406 | ,002 | ,000 | ,000 | ,000 |
| N | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Y.5 Pearson Correlation | ,149 | ,096 | ,221 | ,123 | 1 | ,441** | ,120 | ,140 | ,427** |
| Sig. (2-tailed) | ,314 | ,515 | ,131 | ,406 | | ,002 | ,417 | ,342 | ,002 |
| N | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Y.6 Pearson Correlation | ,075 | ,242 | ,282 | ,435** | ,441** | 1 | ,502** | ,175 | ,572** |
| Sig. (2-tailed) | ,614 | ,097 | ,052 | ,002 | ,002 | | ,000 | ,234 | ,000 |
| N | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Y.7 Pearson Correlation | ,225 | ,402** | ,190 | ,485** | ,120 | ,502** | 1 | ,222 | ,597** |
| Sig. (2-tailed) | ,125 | ,005 | ,195 | ,000 | ,417 | ,000 | | ,130 | ,000 |
| N | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Y.8 Pearson Correlation | ,223 | ,431** | ,618** | ,545** | ,140 | ,175 | ,222 | 1 | ,708** |
| Sig. (2-tailed) | ,127 | ,002 | ,000 | ,000 | ,342 | ,234 | ,130 | | ,000 |
| N | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Y Pearson Correlation | ,504** | ,735** | ,726** | ,765** | ,427** | ,572** | ,597** | ,708** | 1 |
| Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,002 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| N | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Uji Reliabilitas

X1

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 48 | 100,0 |
| | Excluded ^a | 0 | ,0 |
| | Total | 48 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,744 | 11 |

X2

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 48 | 100,0 |
| | Excluded ^a | 0 | ,0 |
| | Total | 48 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,670 | 4 |

X3

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 48 | 100,0 |
| | Excluded ^a | 0 | ,0 |
| | Total | 48 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,735 | 4 |

X4

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 48 | 100,0 |
| | Excluded ^a | 0 | ,0 |
| | Total | 48 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,832 | 4 |

Y

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 48 | 100,0 |
| | Excluded ^a | 0 | ,0 |
| | Total | 48 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,754 | 9 |

Lampiran 5 Analisis Regresi Linier Berganda

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,875 ^a | ,765 | ,744 | 1,83591 |

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 472,982 | 4 | 118,246 | 35,082 | ,000 ^b |
| | Residual | 144,935 | 43 | 3,371 | | |
| | Total | 617,917 | 47 | | | |

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | ,215 | 3,307 | | ,549 | ,586 |
| | X1 | ,297 | ,093 | ,342 | 3,202 | ,003 |
| | X2 | ,635 | ,254 | ,201 | 2,499 | ,016 |
| | X3 | ,533 | ,220 | ,235 | 2,418 | ,020 |
| | X4 | ,654 | ,195 | ,332 | 3,363 | ,002 |

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | X1 | X2 | X3 | X4 | Y |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| N | | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 40,0000 | 11,4583 | 11,4167 | 10,7292 | 30,4583 |
| | Std. Deviation | 4,17694 | 1,14777 | 1,59565 | 1,84206 | 3,62590 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,197 | ,286 | ,226 | ,192 | ,165 |
| | Positive | ,104 | ,256 | ,128 | ,141 | ,148 |
| | Negative | -,197 | -,286 | -,226 | -,192 | -,165 |
| Test Statistic | | ,197 | ,286 | ,226 | ,192 | ,165 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,170 ^c | ,112 ^c | ,142 ^c | ,121 ^c | ,200 ^c |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | ,215 | 3,307 | | ,549 | ,586 | | |
| X1 | ,297 | ,093 | ,342 | 3,202 | ,003 | ,477 | 2,096 |
| X2 | ,635 | ,254 | ,201 | 2,499 | ,016 | ,842 | 1,188 |
| X3 | ,533 | ,220 | ,235 | 2,418 | ,020 | ,580 | 1,725 |
| X4 | ,654 | ,195 | ,332 | 3,363 | ,002 | ,558 | 1,792 |

a. Dependent Variable: Y

c. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 | (Constant) | ,483 | 2,167 | | ,223 | ,825 |
| | X1 | ,055 | ,061 | ,192 | ,907 | ,369 |
| | X2 | -,002 | ,167 | -,002 | -,010 | ,992 |
| | X3 | ,102 | ,144 | ,136 | ,709 | ,482 |
| | X4 | -,240 | ,128 | -,367 | -1,880 | ,067 |

a. Dependent Variable: RES2

Lampiran 7 Uji Hipotesis

a. Uji t

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | ,215 | 3,307 | | ,549 | ,586 |
| | X1 | ,297 | ,093 | ,342 | 3,202 | ,003 |
| | X2 | ,635 | ,254 | ,201 | 2,499 | ,016 |
| | X3 | ,533 | ,220 | ,235 | 2,418 | ,020 |
| | X4 | ,654 | ,195 | ,332 | 3,363 | ,002 |

a. Dependent Variable: Y

b. Uji F

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 472,982 | 4 | 118,246 | 35,082 | ,000 ^b |
| | Residual | 144,935 | 43 | 3,371 | | |
| | Total | 617,917 | 47 | | | |

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

c. Uji Koefisienan Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,875 ^a | ,765 | ,744 | 1,83591 |

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 8 Rtabel

| N | The Level of Significance | | N | The Level of Significance | |
|----|---------------------------|-------|------|---------------------------|-------|
| | 5% | 1% | | 5% | 1% |
| 3 | 0.997 | 0.999 | 38 | 0.320 | 0.413 |
| 4 | 0.950 | 0.990 | 39 | 0.316 | 0.408 |
| 5 | 0.878 | 0.959 | 40 | 0.312 | 0.403 |
| 6 | 0.811 | 0.917 | 41 | 0.308 | 0.398 |
| 7 | 0.754 | 0.874 | 42 | 0.304 | 0.393 |
| 8 | 0.707 | 0.834 | 43 | 0.301 | 0.389 |
| 9 | 0.666 | 0.798 | 44 | 0.297 | 0.384 |
| 10 | 0.632 | 0.765 | 45 | 0.294 | 0.380 |
| 11 | 0.602 | 0.735 | 46 | 0.291 | 0.376 |
| 12 | 0.576 | 0.708 | 47 | 0.288 | 0.372 |
| 13 | 0.553 | 0.684 | 48 | 0.284 | 0.368 |
| 14 | 0.532 | 0.661 | 49 | 0.281 | 0.364 |
| 15 | 0.514 | 0.641 | 50 | 0.279 | 0.361 |
| 16 | 0.497 | 0.623 | 55 | 0.266 | 0.345 |
| 17 | 0.482 | 0.606 | 60 | 0.254 | 0.330 |
| 18 | 0.468 | 0.590 | 65 | 0.244 | 0.317 |
| 19 | 0.456 | 0.575 | 70 | 0.235 | 0.306 |
| 20 | 0.444 | 0.561 | 75 | 0.227 | 0.296 |
| 21 | 0.433 | 0.549 | 80 | 0.220 | 0.286 |
| 22 | 0.432 | 0.537 | 85 | 0.213 | 0.278 |
| 23 | 0.413 | 0.526 | 90 | 0.207 | 0.267 |
| 24 | 0.404 | 0.515 | 95 | 0.202 | 0.263 |
| 25 | 0.396 | 0.505 | 100 | 0.195 | 0.256 |
| 26 | 0.388 | 0.496 | 125 | 0.176 | 0.230 |
| 27 | 0.381 | 0.487 | 150 | 0.159 | 0.210 |
| 28 | 0.374 | 0.478 | 175 | 0.148 | 0.194 |
| 29 | 0.367 | 0.470 | 200 | 0.138 | 0.181 |
| 30 | 0.361 | 0.463 | 300 | 0.113 | 0.148 |
| 31 | 0.355 | 0.456 | 400 | 0.098 | 0.128 |
| 32 | 0.349 | 0.449 | 500 | 0.088 | 0.115 |
| 33 | 0.344 | 0.442 | 600 | 0.080 | 0.105 |
| 34 | 0.339 | 0.436 | 700 | 0.074 | 0.097 |
| 35 | 0.334 | 0.430 | 800 | 0.070 | 0.091 |
| 36 | 0.329 | 0.424 | 900 | 0.065 | 0.086 |
| 37 | 0.325 | 0.418 | 1000 | 0.062 | 0.081 |